

BAB V

KESIMPULAN

Sepanjang 2000 sampai 2006, pemerintah Turki dibawah kepemimpinan presiden Ahmet Necdet Sezer menerpakan kebijakan standar ganda berupa kebijakan reintegrasi dan represif terhadap kelompok-kelompok perjuangan Kurdi. Dua bentuk perwajahan kebijakan pemerintah Turki terhadap kelompok etnis Kurdi tersebut dalam rangka menstabilkan pemerintahan yang ada di Turki. Dua bentuk standar tersebut berupa, kebijakan reintegrasi yang menggunakan cara-cara demokratis dalam menenangkan kelompok pemberontak. Sedangkan bentuk kebijakan kedua adalah kebijakan represif yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk menekan dan melemahkan kelompok pemberontak.

Dalam undang-undang yang ada di Turki, pemerintah memberikan kebebasan berpolitik kepada kelompok separatis Kurdi. Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Namun, dalam pelaksanaan kehidupan bernegara, pemerintah memberikan tekanan yang luar biasa pada kelompok separatis Kurdi lainnya dengan menggunakan kekuasaan militer, membatasi pergerakan politik, membatasi perkembangan kebudayaan Kurdi serta menerapkan politik pecah belah terhadap gerakan separatis Kurdi yang bertentangan dan dirasa membangkang terhadap pemerintah.

Dua kelompok Kurdi yang bisa menjadi contoh kontras standar ganda kebijakan Turki tersebut bisa dilihat dalam dua kelompok besar gerakan separatise Kurdi; PKK dan HADEP. PKK yang menggunakan cara kekerasan dalam

memperjuangkan kepentingan Kurdi mendapatkan perlakuan yang sedemikian keras dari pemerintah Turki. Sedangkan, HADEP yang menggunakan jalur aman seperti politik dengan menjadi partai resmi pemerintah masih bisa sedikit diberi kelonggaran untuk beraktifitas tapi tetap dalam pengawasan pemerintah.

Perlakuan Turki ini memang tidak akan pernah lepas dari pengaruh internal dan juga eksternal. Pengaruh internal datang dari sikap dan instrumen apa yang gerakan separatise gunakan dalam perjuangannya. HADEP yang masih mempergunakan cara-cara demokrasi memperoleh kebijakan yang reintegrasi. Namun, PKK yang menggunakan jalur kekuasaan mendapatkan perlakuan kebijakan represif dari pemerintah Turki. Memang, faktor eksternal juga berpengaruh bagi perkembangan kebijakan Turki ini seperti adanya keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa, tekanan dari negara tetangga, kelompok Kurdi di luar negeri, para pejuang HAM, dan faktor yang lainnya.

Akan tetapi, semua tingkah laku pemerintah turki di bawah rezim Sezer itu tidak akan pernah lepas dari peran sejarah dan juga perkembangan kedewasaan demokrasi di Turki. Masa transisi dari kerajaan Turki ustmani kemudian dilanjutkan dengan Republik Turki masa Ataturk pastilah masih menyisakan dorongan untuk sebuah rezim yang mendorong ke arah represif. Disamping keadaan negara yang dilanda berbagai macam masalah dengan adanya separatise dan juga masalah perekonomian. Kesemuanya itu menjadi proses pembelajaran bagi republik Turki untuk terus menjadi negara yang demokratis serta bebas dari ketidakstabilan internal negara dan daya tawar internasional yang lemah, dengan berusaha menjadi negara republik yang berisi beranekaragam suku namun bisa

sejalan dengan cita-cita negara. Nyatanya, itu juga masih sulit sampai sekarang. Kalau pemerintah Turki masih mengedepankan tindakan serta kebijakan represif daripada menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan-kebijakan reintegratif bagi seluruh warga negara Turki, terlebih khusus lagi etnis Kurdi.